

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMINTAAN MAHAR
YANG DISAMAKAN DENGAN BIAYA OPERASI CESAR
(Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2011 040 Oleh: AS	No. REG : 5-2011/AS/040 ASAL BUKU : TANGGAL :

EKA FITRI ASEJATI
MM: CO 1207009

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syakhsiiyyah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Eka Fitria Sejati
NIM : C01207009
Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi : *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permintaan Mahar yang Dipersamakan Dengan Biaya Cesar Di Desa Leran Kecamatan MANYAR Kabupaten Gresik"*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGALAMAN BENCANA
TGA
DD000AAF744716136

ENAM RIBU RUPIAH
6000

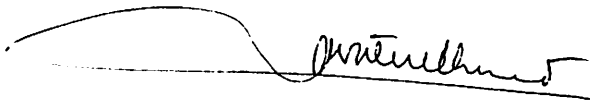
DJP

Eka FitriaSejati
C01207009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **EKA FITRIASEJATI, NIM. C01207009** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2011
Pembimbing Skripsi



Dr. Hj. Dakwatul Chairah M.Ag.

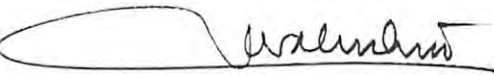
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Eka Fitriasejati ini telah diujikan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



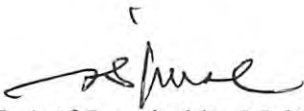
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP.195704231986032001

Sekretaris,



Muh. Sholahuddin, M. Hi.
NIP. 197707252008011009

Penguji I,



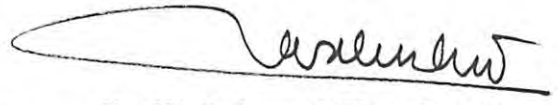
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji II,



Muwahid, SH, M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Pembimbing,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP.195704231986032001

Surabaya, 13 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

mutlak untuk digauli oleh pemberi mahar. Dan sebagai lambang kesanggupan suami untuk menafkahi lahir dan batin.

Mahar yang dikemas dengan harga mahal kini telah membudaya dikalangan kaum muslimin. Hal ini disebabkan karena kesalahan para orang tua yang menganggap bahwa mahar adalah sebagai dasar membangun kehidupan suami istri. Karena itu siapa yang lebih besar maharnya, maka dialah yang paling berhak menikahi anak gadisnya. Dengan demikian gadis-gadis tidaklah lebih dari barang dagangan yang patut diperjual belikan.

Seandainya orang tua mengerti benar maksud diwajibkan membayar mahar dalam pernikahan, niscaya mereka tidak meminta syarat-syarat yang memberatkan yang tidak ada keterangan dan penjelasan dari agama.

Tidak sedikit kaum muslimin yang telah melupakan ajaran-ajaran leluhur seperti ini, lalu berlomba-lomba dalam kemewahan dan pemborosan, baik yang berkenaan dengan tingginya mahar ataupun maharnya upacara-upacara pernikahan, sehingga banyak kendala bagi seseorang untuk melakukan pernikahan dengan cara mudah dan lebih ringan.

Sehingga menyebabkan timbulnya penyakit sosial yaitu prostitusi, di mana tempat-tempat untuk melakukan hubungan seksual dan cara-cara yang diharamkan oleh Allah SWT ataupun hubungan di luar nikah, daripada melakukannya dalam pernikahan yang dihalalkan bahkan dianjurkan olehnya, dikarenakan lebih murah dan gampang dalam memenuhi biologis.

Hadits di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian lebih dulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh, segolongan ahli fiqh berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri.

Diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar(diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya, demikian pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolekannya karena perceraian. Ini adalah pendapat Al-Auza'i. perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan atau tidak dapat disamakan dengannya.

Bagi fuqaha yang mengatakan bahwa nikah disamakan dengan jual beli. Mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.

suami di mana si istri harus tahu berapa besar dan ujud dari mahar yang menjadi haknya itu.

Setelah si istri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istrinya itu. Misalnya ia membebaskan suami untuk pemberian mahar itu atau mengurangi jumlah, merubah ujud dan lain sebagainya.

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinannya selanjutnya. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pemberian atau upah bagi istri yang telah menyatakan dirinya kepada suami.

Adapun jumlah besarnya dan kecinya maskawin itupun tidak ditentukan dengan pasti. Hal ini tergantung kepada kemampuan calon suami dan persetujuan dari masing-masing pihak, yang akan kawin. Jangalah hendaknya ketidak sanggupannya membayar maskawin yang jumlahnya besar menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan. Yang penting calon suami wajib memberi mahar kepada istrinya dalam bentuk atau apapun asal mempunyai nilai dan halal. Bahkan mahar ada pula yang berupa upah.

Dalam hal ini seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang wanita melakukan suatu pekerjaan pada pihak istri yang bias mendatangkan upah,

Mustofa Al-maraghi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak.

Mahar sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upah atas pekerjaan memelihara dan membesarkan anak-anak yang lahir akibat pernikahan tersebut, atau lebih-lebih sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual yang diberikan istri kepada suami.

Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela ia rela mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai sesuatu kewajiban terhadap istrinya.

Dengan demikian, mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pemberian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam Islam. Akan tetapi besarnya mahar disesuaikan dengan kebiasaan disuatu daerah dan melihat kondisi ekonomi antara satu dan lain tempat akan berbeda-beda.

Sebagaimana dijelaskan diatas, mahar itu hak seorang wanita, karena itu dialah yang menentukan jumlah mahar yang diinginkan.

Oleh karena itu, istri memiliki wewenang penuh untuk menetapkan besarnya mahar itu kepada suaminya.

Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi terjadinya permintaan mahar yang dipersamakan dengan biaya cesar :

1. Calon istri takut untuk bentuk tubuhnya berubah menjadi gemuk.
2. Karena merasa calon istri tersebut sangat cantik sehingga banyak para lelaki yang suka padanya.
3. Calon istri tidak menginginkan vaginanya dijahit.
4. Calon istri takut mati.

Adapun alasan calon istri meminta mahar yang disamakan dengan biaya operasi *cesar* di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam hukum Islam tidak ditentukan, karena konsep tentang mahar adalah menjadi bagian yang penting dalam perkawinan. Tanpa adanya mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan perkawinan dengan benar. Besar kecilnya jumlah mahar ditetapkan sebelum pelaksanaan perkawinan, dengan perempuan yang

Banyak sekali manusia yang tidak mengenal ajaran ini. Bahkan menyalahinya dan berpegang kepada adat jahiliyah dalam.

Jenis mahar ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan).

Mengenai masalah ini, para fuqaha' berselisih pendapat tentang dua persoalan, yaitu tentang kawin buruh, dan kawin dengan hamba sahaya perempuan dengan menjadikan merdekaannya sebagai mahar.

Dalam Madzhab Maliki terdapat tiga pendapat berkenaan dengan kawin buruh. Pendapat pertama membolehkan, pendapat kedua melarang, dan pendapat ketiga memakruhkan. Tetapi pendapat yang terkenal dari Imam Malik adalah memakruhkan. Oleh karenanya, ia mengharuskan dibatalkannya perkawinan sebelum terjadinya pergaulan.

Para Ulama' sepakat bahwa tidak ada batasan tentang jumlah besar maksimalnya jumlah mahar, dan sedang jumlah minimal mahar terdapat perbedaan diantara para Ulama'.

Menurut Imam Syafi'I batasan tentang minimal mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia dan kalau dirasakan oleh seseorang maka ada baginya nilai harga, sedangkan menurut Imam Malik adalah seperempat dinar. Bahkan Imam Malik berkata "saya tidak pernah melihat seorang perempuan dinikahkan dengan mahar kurang dari seperempat dinar. Jadi di dalam Islam belum jelas berapa besar ataupun kecilnya sebuah mahar, jadi mengenai alasan

